

Pelatihan Aplikasi Keuangan BUMDes untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan

Burhan¹, Agus Seswandi², Fahmi Oemar³, Indarti⁴, Bambang Supeno⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana - Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author

E-mail: f2bams@gmail.com*

Article History:

Received: 10 Mei 2026

Revised: 10 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Abstract: Village-Owned Enterprises (BUMDes) play an important role in strengthening rural economies through effective management of local resources. However, many BUMDes continue to experience challenges in financial management, including manual bookkeeping, limited managerial competencies, and low utilization of digital technology, which reduce financial accountability and reporting quality. This community service program aimed to improve the financial management competencies of BUMDes managers through training on digital financial applications. The program was implemented in Kampar Regency, Riau Province, using a participatory approach consisting of needs assessment, training sessions, practical exercises, implementation assistance, and evaluation through pre-test and post-test. The findings indicate a substantial improvement in participants' knowledge and skills, with average scores increasing from 2.55 in the pre-test to 4.35 in the post-test. Participants demonstrated better abilities in transaction recording, financial statement preparation, and the application of digital financial systems. The program contributed to strengthening financial transparency, accountability, and sustainable governance practices within Village-Owned Enterprises.

Keywords:

BUMDes, Financial Application, Accountability, Financial Digitalization, Village Governance

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara mandiri. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengembangkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan kemandirian ekonomi. Salah satu instrumen yang dibentuk untuk mendukung tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Republik Indonesia, 2014).

BUMDes berperan strategis sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha yang disesuaikan dengan potensi desa. Selain berorientasi pada keuntungan, BUMDes juga berfungsi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Meskipun jumlah BUMDes di Indonesia terus meningkat, kualitas tata kelola dan kinerja usaha belum sepenuhnya mengalami perkembangan yang seimbang. Berbagai kendala, seperti lemahnya sistem manajemen, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan kurang optimalnya pengelolaan keuangan, masih menjadi tantangan utama (Abdullah et al., 2024; Asmawanti et al., 2022). Pengelolaan keuangan yang belum tertata menyebabkan informasi keuangan tidak tersedia secara akurat dan tepat waktu, padahal laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam evaluasi kinerja, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan strategis (Fitriani et al., 2024).

Dalam perspektif tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari konsep good governance yang menjadi landasan dalam pengelolaan organisasi publik maupun organisasi ekonomi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes sehingga seluruh aktivitas usaha dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun finansial (Mardiasmo, 2018).

Tantangan yang dihadapi BUMDes semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan bisnis. Era digital menuntut setiap organisasi untuk mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam proses modernisasi tata kelola organisasi karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses kerja, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan BUMDes menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Digitalisasi keuangan merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang saat ini banyak diterapkan oleh berbagai organisasi. Melalui digitalisasi, proses pencatatan transaksi, penyimpanan data, penyusunan laporan, hingga analisis keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan aplikasi keuangan mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada

sistem manual serta meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. (Najmudin et al., 2024). Dengan demikian, digitalisasi keuangan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan organisasi desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. (Najmudin et al., 2024) menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan mempercepat proses pelaporan keuangan pada organisasi ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi.

Meskipun manfaat digitalisasi telah banyak dibuktikan, implementasi teknologi keuangan pada BUMDes masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi digital pengelola BUMDes. Sebagian besar pengurus BUMDes berasal dari masyarakat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam sehingga kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi keuangan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat adopsi teknologi di lingkungan BUMDes (Najmudin et al., 2024; Rahayu & Adi, 2024).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada BUMDes di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengelola BUMDes, diketahui bahwa sebagian besar pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas sederhana. Sistem pencatatan tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan belum dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Permasalahan utama BUMDes adalah rendahnya pemahaman pengelola terhadap fungsi laporan keuangan sebagai alat manajemen untuk mendukung keberlanjutan usaha. Laporan keuangan masih dipandang sebatas kewajiban administratif sehingga belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting (Fitriani et al., 2024; Rahayu & Adi, 2024). Pelatihan penggunaan aplikasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman teoretis dan keterampilan praktis dalam pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, pendampingan berperan dalam membantu pengelola mengatasi berbagai kendala selama proses implementasi. Melalui kombinasi pelatihan, praktik, dan pendampingan, program pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes

dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (Fitriani et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam penggunaan aplikasi keuangan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan serta mendorong penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada pengurus BUMDes di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Action Approach*) yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi Permasalahan
Tim melakukan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengurus BUMDes untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan kebutuhan pelatihan.
2. Pelaksanaan Pelatihan
Materi yang diberikan mencakup:
 - a. Konsep dasar pengelolaan keuangan BUMDes;
 - b. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan;
 - c. Pengenalan aplikasi keuangan BUMDes;
 - d. Pencatatan transaksi keuangan;
 - e. Penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas;
 - f. Analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
3. Pendampingan Implementasi
Peserta memperoleh bimbingan langsung dalam penerapan aplikasi keuangan pada transaksi riil yang terjadi pada masing-masing BUMDes.
4. Evaluasi
Evaluasi dilakukan melalui metode pre-test dan post-test menggunakan skala Likert 1–5. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Hasil

1. Profil Permasalahan Mitra

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes yang menjadi mitra kegiatan masih menerapkan sistem pencatatan keuangan secara manual. Pencatatan transaksi dilakukan menggunakan buku kas atau lembar kerja sederhana sehingga proses administrasi keuangan belum terintegrasi secara sistematis. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan data keuangan menjadi kurang efektif, terutama ketika jumlah transaksi usaha semakin meningkat.

Penggunaan sistem pencatatan manual menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Pengelola harus melakukan rekapitulasi transaksi secara berulang sebelum laporan dapat disusun dan disajikan. Situasi tersebut sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah desa maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain menghambat ketepatan waktu pelaporan, sistem pencatatan manual meningkatkan risiko kesalahan transaksi, seperti kesalahan input data, pengelompokan akun, dan perhitungan saldo. Kondisi ini menyebabkan kualitas informasi keuangan menjadi kurang akurat sehingga menyulitkan pengurus BUMDes dalam mengevaluasi kinerja, menyusun perencanaan, dan mengembangkan strategi usaha. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Syahyuti (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan organisasi ekonomi desa. Kelembagaan yang kuat dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten akan mampu

mengelola usaha secara lebih efektif, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengelola melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi keuangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja BUMDes secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kompetensi Peserta

Kegiatan pelatihan diikuti oleh para pengelola BUMDes yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi awal, sebagian besar peserta masih menggunakan sistem pencatatan transaksi secara manual dan belum memanfaatkan teknologi digital dalam proses administrasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara efektif dan efisien.



Gambar 2. Pembukaan Pelatihan oleh Sekretaris Desa

Pelatihan dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola keuangan BUMDes secara lebih profesional. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar pengelolaan keuangan BUMDes, prinsip transparansi dan akuntabilitas, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan secara digital (Angraeni et al., 2024).

Pelaksanaan pelatihan menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi interaktif, demonstrasi aplikasi, dan praktik langsung. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik, sedangkan diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, dan kebutuhan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Demonstrasi aplikasi dilakukan untuk memperkenalkan fitur-fitur utama yang tersedia dalam aplikasi keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung dengan menggunakan data transaksi yang

disesuaikan dengan kondisi usaha BUMDes masing-masing. Pendekatan ini membantu peserta memahami alur penggunaan aplikasi secara lebih komprehensif dan aplikatif.

Penerapan metode pembelajaran yang mengombinasikan teori dan praktik terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam mengoperasikan aplikasi keuangan. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel

Tabel 1. Hasil Rata-rata Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan

Indikator	Pre-Test	Post-Test
Pengelolaan Keuangan BUMDes	2,6	4,4
Transparansi dan Akuntabilitas	2,8	4,5
Pencatatan Transaksi	2,5	4,3
Penggunaan Aplikasi Keuangan	2,3	4,2
Penyusunan Laporan Keuangan	2,4	4,3
Pemanfaatan Laporan Keuangan	2,7	4,4
Rata-rata	2,55	4,35

Hasil evaluasi yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi keuangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta pada seluruh indikator yang diukur. Secara umum, rata-rata nilai peserta meningkat dari 2,55 pada saat pre-test menjadi 4,35 pada saat post-test. Peningkatan sebesar 1,80 poin atau sekitar 70,59% tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode pelatihan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan peserta dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan organisasi secara lebih efektif.

Pada indikator pengelolaan keuangan BUMDes, nilai rata-rata meningkat dari 2,6 menjadi 4,4. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Kemampuan tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang baik karena pengelolaan keuangan yang efektif akan mendukung keberlanjutan usaha, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat daya saing BUMDes dalam mengembangkan unit usahanya.

Indikator transparansi dan akuntabilitas mengalami peningkatan dari 2,8 menjadi 4,5 dan merupakan nilai post-test tertinggi dibandingkan indikator lainnya.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan organisasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan meningkatnya pemahaman pada aspek ini, diharapkan pengurus BUMDes mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pada aspek pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata pencatatan transaksi meningkat dari 2,5 menjadi 4,3, sedangkan kemampuan penyusunan laporan keuangan meningkat dari 2,4 menjadi 4,3. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memahami prosedur pencatatan transaksi secara sistematis dan mampu mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan yang lebih terstruktur. Kemampuan ini sangat penting karena kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pencatatan transaksi yang dilakukan pada setiap aktivitas usaha BUMDes.

Aspek penggunaan aplikasi keuangan mengalami peningkatan terbesar, dari 2,3 menjadi 4,2. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pencatatan transaksi, mengelompokkan akun, mengelola data, dan menyusun laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, pemanfaatan laporan keuangan juga meningkat dari 2,7 menjadi 4,4. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami fungsi laporan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif.

Peserta memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Penggunaan aplikasi keuangan dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi, mempercepat penyusunan laporan, serta mengurangi kesalahan administrasi. Selain itu, aplikasi juga mendukung proses pemantauan kinerja usaha secara lebih efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan dapat menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan BUMDes.

3. Dampak Implementasi Program

Setelah pelatihan, peserta mampu:

1. Melakukan pencatatan transaksi secara digital.
2. Menyusun laporan keuangan secara otomatis.
3. Mengurangi kesalahan pencatatan manual.
4. Meningkatkan transparansi pelaporan kepada pemerintah desa.
5. Memanfaatkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi keuangan

memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kemampuan pengelola BUMDes dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, peserta telah mampu melakukan pencatatan transaksi secara digital menggunakan aplikasi keuangan yang diperkenalkan. Kemampuan ini menjadi langkah penting dalam proses transformasi pengelolaan keuangan dari sistem manual menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi.



Gambar 3 : Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan BUMDes

Peningkatan kompetensi juga terlihat pada kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan secara otomatis. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih menyusun laporan keuangan secara manual yang membutuhkan waktu relatif lama dan rentan terhadap kesalahan perhitungan. Setelah memahami penggunaan aplikasi keuangan, peserta mampu menghasilkan laporan keuangan secara lebih cepat dan sistematis. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu pengurus dalam memperoleh informasi keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu (Yuliafitri et al., 2024).

Penerapan aplikasi keuangan berkontribusi dalam mengurangi kesalahan pencatatan transaksi, pengelompokan akun, dan perhitungan saldo yang sering terjadi pada sistem manual. Otomatisasi proses pencatatan mampu meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan aplikasi keuangan juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan yang lebih lengkap, sistematis, dan mudah ditelusuri. Kondisi ini membantu pengelola BUMDes dalam melakukan evaluasi kinerja, menyusun perencanaan, dan merancang strategi pengembangan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail dan Amaliah (2026) serta Widiastuti et al. (2025) yang menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Klapper et al., 2015) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan organisasi ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu,

dan mudah diakses, BUMDes memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta memperluas akses terhadap berbagai program pengembangan usaha dan kemitraan di masa mendatang (Purwohedi et al., 2025).

Diskusi

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Kampar adalah rendahnya kapasitas pengelola dalam menerapkan pengelolaan keuangan berbasis digital. Penggunaan sistem pencatatan manual menyebabkan penyusunan laporan keuangan menjadi lambat, rentan terhadap kesalahan, dan kurang mendukung pengambilan keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelatihan dan pendampingan dilaksanakan menggunakan *Participatory Action Approach* melalui penyampaian materi, demonstrasi, praktik, dan pendampingan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes (Pratistha et al., 2026; Safri et al., 2025).

Efektivitas program ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata peserta dari 2,55 pada *pre-test* menjadi 4,35 pada *post-test*, yang mengindikasikan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan berbasis digital. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan literasi digital serta kompetensi teknis pengelola BUMDes, terutama dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan aplikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Najmudin et al. (2024), Khairani et al. (2025), dan Uguy et al. (2026) yang menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas pelaporan, transparansi, dan pengambilan keputusan organisasi.

Lebih lanjut, hasil pengabdian menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mendorong perubahan tata kelola BUMDes. Pengelola mulai beralih dari sistem pencatatan manual menuju pengelolaan keuangan berbasis digital yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Laporan keuangan yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai dokumen administratif mulai dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan usaha. Perubahan ini sejalan dengan *Diffusion of Innovation Theory* yang menjelaskan bahwa inovasi akan lebih mudah diterima ketika memberikan manfaat yang nyata. Selain meningkatkan kualitas tata kelola, transformasi tersebut juga berpotensi memperkuat kepercayaan pemerintah desa dan masyarakat terhadap BUMDes melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Pelatihan penggunaan aplikasi keuangan berhasil meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan berbasis digital. Rata-rata skor peserta meningkat dari 2,55 menjadi 4,35 setelah pelatihan. Program ini mampu meningkatkan kemampuan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan secara berkala, dukungan pemerintah desa, serta penguatan kebijakan digitalisasi tata kelola BUMDes agar manfaat yang diperoleh dapat dipertahankan dan diperluas.

Daftar Referensi

- Abdullah, F., Mediaty, & Anshari, A. (2024). Financial management of village-owned Enterprises affected by employee competency and organizational culture. *Mandar Journal*, 6(2), 104–112. <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i2.3845>
- Angraeni, N., Musmulyadi, Arwin, & Rusnaena. (2024). Effectiveness and efficiency of financial management of village-owned enterprises (BUMDes). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 9(2), 110–131. <https://doi.org/10.32923/asy.v9i2.4983>
- Asmawanti, D., Fitranita, V., & Febriani, R. E. (2022). The exploratory study on performance of village-owned enterprises (BUMDes) in Small Regency Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 26(2), 157–168. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art5>
- Fitriani, D., Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Ismail, S., & Amaliah, T. H. (2026). Governance , accountability , and accounting practices in village-owned enterprises (Bumdes): A scoping review. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 05(06), 10065–10073. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i6.1289>
- Khairani, R., Silaban, P., & Edward, Y. R. (2025). Digital financial literacy and inclusion as determinants of economic sustainability among rural MSMEs. *Proceeding of the International Conference on Management, Entrepreneurship, and Business*, 463–469. <https://doi.org/10.61132/icmeb.v2i2.278>
- Klapper, L., Lusardi, A., & Van Oudheusden, P. (2015). *Financial literacy around the world: Insights from the Standard & Poor's ratings services global financial literacy survey*. DC: World Bank. Paper No. 7255.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (1st ed.). Andi.

- Najmudin, Kadarwati, N., Taufiq, M., & Khotimah, S. (2024). Digital transformation of BUMDes financial management: The effectiveness of BUMDes financial application features in improving the accuracy and ease of financial reporting for service and trade companies. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 4(6), 2203–2212. <https://doi.org/10.55927/ijba.v4i6.12656>
- Pratistha, B., Rahmawati, E., Kamil, A. S., Supriyanti, S. S., Latifah, N., & Aziz, L. (2026). Strengthening digital transformation strategies in village-owned enterprises in Indonesia. In M. D. H. Rahiem (Ed.), *Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology* (1st ed., pp. 112–118). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003654940-18>
- Purwohedi, U., Wastuti, W., Dwipanilih, R., Sudiati, R., & Haryani, P. (2025). Strengthening financial accountability in village-owned enterprises: policy recommendations from a participatory case study in BUMDes Wukirsari, Bantul, di Yogyakarta. *Journal of International SDGs Community Services*, 1(3), 1–13. <https://doi.org/10.9319/jiscs.v1i2.67425>
- Rahayu, E. P., & Adi, H. I. S. (2024). *Financial management HRD application to village-owned enterprises by utilizing digital technology*. 8(1), 84–90. <https://doi.org/10.20473/adj.v8i1.56130>
- Safri, Jumanah, Tati, Lesmana, B., Gunawan, I., & Sari, R. (2025). Success Factors of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Indonesia. *Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH)*, 4(2), 359–379. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.319>
- Uguy, L. S., Kembauw, E., & Nurfajrianty, M. (2026). Innovative management frameworks for sustainable rural enterprises based on digital transformation and institutional resilience to achieve sustainable long-term change. *Proceeding National Conference Business, Management, and Accounting (NCBMA)*, 2026(April), 1157–1167. <https://ojs.uph.edu/index.php/NCBMA/article/view/11408>
- Widiastuti, H., Utami, E. R., & Wulandari, E. (2025). Accountability , transparency , social innovation and performance : a village-owned enterprise perspective in an emerging country. *Social Enterprise Journal*, 22(1), 188–218. <https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2024-0139>
- Yuliafitri, I., Kanti, R. A., & Fatmawati, F. U. (2024). BUMDes accounting workshop as an effort to improve BUMDes united accountability pangalengan village. *ABDI Dosen*, 8(4), 1822–1827. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v8i4.2540>